

## Sejarah Pendidikan Indonesia Masa Orde Baru: Mengungkap Keberhasilan dan Kegagalan Kebijakan Pemerintah Orde Baru dalam Bidang Pendidikan

*The History of Education in Indonesia During the New Order Period: Revealing the Success and Failure of New Order Government Policies in the Educational Field*

Fauzan Syahru Ramadhan<sup>1✉</sup>, Nur Ramadhani Catur Anggoro<sup>2</sup>, Muhammad Setyo Pramono<sup>3</sup>, Garin Ahmad Indradaffa<sup>4</sup>

<sup>1✉ 2 3 4</sup> Universitas Diponegoro

E-mail: [fauzanuzan@lecturer.undip.ac.id](mailto:fauzanuzan@lecturer.undip.ac.id)<sup>✉</sup>, [nurramadhanicatura@gmail.com](mailto:nurramadhanicatura@gmail.com), [msetyopramono@gmail.com](mailto:msetyopramono@gmail.com), [garinahmadindradaffa@students.undip.ac.id](mailto:garinahmadindradaffa@students.undip.ac.id)

Diterima: 22 Juni 2023 | Direvisi: 12 Agustus 2024 | Diterbitkan: 16 Agustus 2024

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords:

History of Indonesian Education, New Order Period, Success and failure, Government Policy.

*This article focuses on the success and failure of policies implemented by the Government of the Republic of Indonesia, especially during the New Order government in the field of Education. There are many problems in the field of education that occurred during the New Order, such as the problem of equitable distribution of education, improving the quality, effectiveness, efficiency, and relevance of education to national development. Therefore, this article aims to find out how the response of the New Order government in dealing with educational problems that can be quickly resolved. This article uses historical methods that include heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of this article show that the policies taken by The New Order government have an orientation to improve public welfare and solve problems in the field of education, but not all policies taken in the implementation process run well and smoothly. There are policies that in the process of implementation actually failed.*

#### Kata Kunci:

Sejarah Pendidikan Indonesia, Masa Orde Baru, Keberhasilan dan Kegagalan, Kebijakan Pemerintah.

Artikel ini fokus mengkaji tentang keberhasilan dan kegagalan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia khususnya pada masa Pemerintahan Orde Baru dalam bidang pendidikan. Terdapat banyak permasalahan dalam bidang pendidikan yang terjadi pada masa Orde Baru, seperti masalah pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas, efektivitas, efisiensi, serta relevansi pendidikan terhadap pembangunan nasional. Oleh sebab itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respons Pemerintah Orde Baru dalam menghadapi permasalahan pendidikan itu supaya dapat dengan cepat diselesaikan. Artikel ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil kajian artikel ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Orde Baru memiliki orientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan dalam bidang pendidikan, akan tetapi tidak semua kebijakan yang diambil dalam proses pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar. Terdapat kebijakan yang dalam proses pelaksanaannya justru mengalami kegagalan.

## **PENDAHULUAN**

Masa Orde Baru adalah masa Pemerintahan Indonesia yang dipegang oleh pemerintah absolut dan otoriter. Hal tersebut dibuktikan dengan kebebasan berpendapat dibatasi, segala kepentingan negara hanya diatur oleh pemerintah tanpa melibatkan rakyat, rakyat hanya mendapatkan hasilnya saja tanpa ikut disertakan dalam urusan negara. Masa Orde Baru dipegang oleh Presiden Soeharto yang merupakan presiden kedua Republik Indonesia. Pada masa Orde Baru tersebut, sistem pendidikan Indonesia juga mengalami perkembangan dan perubahan. Perkembangan dapat dilihat dari kurikulum, mata pelajaran atau mata kuliah yang disajikan, tujuan pendidikan, kebijakan pendidikan, implementasi pendidikan dan lain sebagainya begitu juga dengan perubahan pendidikan (Abar, 1995).

Terdapat banyak permasalahan pendidikan yang terjadi pada masa Pemerintahan Orde Baru, diantaranya adalah masalah pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas, efektivitas, efisiensi, serta relevansi pendidikan terhadap pembangunan nasional. Keempat permasalahan tersebut adalah permasalahan kompleks yang terjadi pada masa Orde Baru. Oleh karena itu, dari keempat permasalahan tersebut kemudian Pemerintah Orde Baru melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan suatu kebijakan pendidikan dengan tujuan agar permasalahan pendidikan tersebut dapat dengan cepat diselesaikan (Muzammil, 2016).

Kebijakan Pemerintah Orde Baru yang pertama adalah dengan mengeluarkan kebijakan program pemberantasan buta huruf pada tahun 1972 yang dikembangkan lebih lanjut dengan

memberikan keterampilan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan dari kebijakan ini yaitu supaya masyarakat Indonesia khususnya kelas bawah dan menengah bisa membaca dan menulis. Hal itu sebagai modal awal dan syarat wajib bagi mereka untuk dapat memulai masuk ke dalam dunia pendidikan dasar yaitu SD atau Sekolah Dasar atau Sekolah Rakyat pada waktu itu. Kebijakan kedua yaitu melaksanakan pendidikan masyarakat agar masyarakat mempunyai kemampuan mental, spiritual, dan keterampilan yang baik. Tujuannya adalah agar ketika mereka menuntut ilmu, memiliki bekal naluri dan intelektual yang baik supaya ketika mendapatkan ilmu pengetahuan mereka mampu memilah mana yang benar dan tidak (Gunawan, 1986).

Kemudian kebijakan yang ketiga adalah mengenalkan pendidikan luar sekolah yang berorientasi kepada kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Hal itu bertujuan agar mereka mampu memahami kebutuhan praktis yang dibutuhkan pada saat itu, misalnya keterampilan menjahit, memasak, atau berbahasa asing dan lain sebagainya. Kebijakan yang keempat adalah mengenalkan program inovasi pendidikan kepada masyarakat seperti KKN (Kuliah Kerja Nyata), dibukanya sekolah dan universitas terbuka dengan tujuan agar pendidikan Indonesia tidak hanya teori saja, akan tetapi keterampilan juga ikut ambil bagian. Selanjutnya, kebijakan yang kelima adalah pembentukan OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), organisasi mahasiswa kampus seperti BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), SEMA (Senat Mahasiswa), dan lain sebagainya guna memberikan keterampilan cara organisasi

bekerja yang baik, agar dalam bekerja mampu berkoordinasi secara baik. Kebijakan terakhir yang dibuat oleh Pemerintah Orde Baru adalah dengan melaksanakan program orang tua asuh pada tahun 1984 (Gunawan, 1986).

Melihat banyak kebijakan dalam bidang pendidikan yang dibuat oleh Pemerintah Orde Baru di atas, tidak langsung membuat paradigma bahwa program pendidikan itu berjalan dengan mulus dan berhasil. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala yang membuat program kebijakan pendidikan mengalami kegagalan, seperti halnya pada tujuan pendidikan Indonesia masa Orde Baru yaitu membentuk manusia berpembangunan yang berpancasila, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi disertai budi pekerti yang luhur, serta mencintai bangsanya dan sesama manusia yang termuat dalam UUD 1945, hal itu juga sesuai dengan peraturan pemerintah TAP MPR tahun 1973. Walaupun tujuan tersebut murni untuk mengembangkan manusia Indonesia supaya lebih bermoral dan berilmu, akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian, pendidikan pada masa Pemerintahan Orde Baru hanya dijadikan sebagai alat legitimasi pemerintah saja agar tetap langgeng dan berkuasa, instrumen-instrumen yang termuat di dalamnya hanya digunakan sebagai kiasan saja untuk memberikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah mengenai program yang diberikan (Safei & Hudaidah, 2020).

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, artikel ini berfokus mengkaji tentang bagaimana keberhasilan dan kegagalan kebijakan pendidikan di Indonesia pada masa Pemerintahan Orde Baru.

## **METODE**

Artikel ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1983). Dalam metode sejarah meliputi empat langkah yang harus dilakukan yaitu heuristik (pengumpulan sumber), pengujian sumber (kritik), interpretasi, dan historiografi (Notosusanto, 1984). Heuristik adalah suatu proses untuk menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik sumber primer maupun sekunder (Garraghan, 1957). Sumber primer berupa arsip dari peraturan pemerintah pusat dan Undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia. Sementara itu, sumber sekunder yang digunakan bisa berupa artikel ilmiah, penelitian ilmiah, serta buku-buku ilmiah karya para sarjana dan ahli yang berhubungan dengan penelitian.

Sumber primer dan sekunder yang penulis gunakan tersebut diperoleh dari Khasanah Pustaka Nusantara (Khastara), Monumen Pers Nasional Surakarta, Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Perpustakaan Sejarah Universitas Diponegoro, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Suryomihardjo, 1975).

Tahap selanjutnya adalah kritik sumber untuk menguji tingkat autentikasi dan kredibilitas dari sumber sejarah yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan sebuah fakta-fakta sejarah yang relevan. Fakta-fakta sejarah yang relevan yang telah diperoleh melalui tahap kritik selanjutnya ditafsirkan dalam tahap interpretasi guna menghasilkan makna dari fakta relevan yang ada dan saling menghubungkannya agar membentuk satu kesatuan yang harmonis, logis dan

kronologis. Tahap terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi, yaitu kegiatan merekonstruksi peristiwa masa lampau dalam bentuk kisah sejarah yang sistematis, logis, dan ilmiah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga mudah dipahami oleh pembaca (Herlina, 2020).

Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah metodologi pendekatan ilmu-ilmu sosial humaniora termasuk ilmu pendidikan yang digunakan sebagai perangkat analisis dalam penelitian ini. Dalam ilmu pendidikan, konsep-konsep yang digunakan adalah pendidikan, kebudayaan, pengajaran, sejarah, dan lain sebagainya (Siregar, 2008). Ilmu pendidikan merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang masalah-masalah yang mempunyai relevansi dengan pendidikan. Selain itu, ilmu pendidikan juga membahas mengenai masalah-masalah yang bersifat teori, bersifat ilmu, serta bersifat praktis (Hidayat & Abdillah, 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keberhasilan Kebijakan Pendidikan Indonesia pada Masa Pemerintahan Orde Baru**

Kebijakan pendidikan Indonesia yang dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah Orde Baru, mempunyai tujuan utama yaitu untuk mencerdaskan putra putri Indonesia setinggi-tingginya dengan memiliki perilaku budi pekerti yang baik. Tujuan tersebut berlaku untuk seluruh daerah yang masuk dalam wilayah kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Adapun keberhasilan yang dilakukan Pemerintah Orde Baru dalam

menyelenggarakan pendidikan di Indonesia yaitu:

#### **A. Berhasil Menerapkan Program Pemberantasan Buta Huruf**

Pemberantasan Buta Huruf merupakan salah satu program kebijakan dalam bidang pendidikan yang diterapkan pada masa Pemerintahan Orde Baru dengan dasar masalah bahwa sampai tahun 1970, masyarakat Indonesia yang mengalami buta huruf masih tinggi atau dapat dikatakan hanya 40 % dari total penduduk Indonesia yang bisa baca tulis, sisanya mereka mengalami buta huruf terutama masyarakat kelas bawah. Hal itu, menjadi indikator bahwa pendidikan Indonesia masih rendah. Dapat dikatakan pada masa Orde Baru, pemberantasan buta huruf sudah dilakukan oleh Presiden Soekarno, akan tetapi belum merata hingga ke seluruh wilayah Indonesia terutama daerah pelosok atau pedalaman. Melihat hal tersebut, Presiden Soeharto melakukan kerja sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berusaha merumuskan suatu kebijakan untuk memutus angka kebodohan masyarakat Indonesia yang setiap tahun semakin meningkat dengan cara menerapkan program pemberantasan buta huruf yang mulai dilakukan pada tahun 1972 (Djumhur & Danasuprata, 1979).

Menurut data statistik Pemerintah Orde Baru, hingga tahun 1982 atau tepat sepuluh tahun setelah program pemberantasan buta huruf berjalan, setidaknya sebagian besar masyarakat Indonesia sudah bisa baca tulis. Tercatat 90% warga Indonesia dari total jumlah penduduk sudah mampu membaca

dan menulis Bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan lancar. Hal itu, menandakan bahwa program yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru berhasil. Tingkat penduduk yang masuk sekolah pun semakin tahun mengalami peningkatan bahkan yang meneruskan hingga jenjang perguruan tinggi juga mengalami peningkatan daripada masa-masa sebelumnya. Hal itu menandakan bahwa program pemberantasan buta huruf yang diterapkan pada masa Pemerintahan Orde Baru berhasil. Tentu saja, terdapat elemen-elemen pendukung dalam menyukseskan program pemberantasan buta huruf, seperti jasa para guru yang dikirim ke berbagai daerah untuk mengajarkan baca tulis, jasa para mahasiswa juga ikut berperan dan tokoh-tokoh intelektual lainnya (Mestoko, 1985).

## **B. Berhasil Menerapkan Program Wajib Belajar Selama 6 Tahun**

Program wajib belajar selama 6 tahun adalah salah satu program wajib belajar yang diselenggarakan Pemerintah Republik Indonesia pada masa Orde Baru yang kemudian berkembang hingga program wajib belajar selama 9 tahun. Program wajib belajar 6 tahun itu, mulai diselenggarakan oleh Pemerintah Orde Baru pada tahun 1974 dengan dibuktikan pendirian banyak SD Inpres yang dilakukan pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya adalah agar mereka mendapatkan sarana akses sekolah yang memadai. Program tersebut juga ada kaitannya dengan program pemberantasan buta huruf, bagi masyarakat yang ingin masuk sekolah wajib bisa baca tulis dengan benar,

minimal dapat membaca dan menulis Bahasa Indonesia dengan benar. Demikian pula dengan program wajib belajar 6 tahun, tujuan program tersebut dilakukan agar anak-anak usia dini diberikan bekal bagaimana cara membaca, menulis dengan benar, kemudian kegiatan membaca dan menulis itu dapat dikembangkan di SD (Sekolah Dasar) sesuai dengan tingkatannya dan mulai memasuki mata pelajaran khusus seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika dan lain sebagainya (Syaharuddin & Susanto, 2019).

Program wajib belajar 6 tahun dinilai berhasil, hal itu karena banyak siswa yang berusia 7-12 tahun bisa masuk SD dengan baik, khususnya dengan banyak didirikan SD Inpres oleh Pemerintah Republik Indonesia, merupakan suatu prestasi yang luar biasa pada masa awal Pemerintahan Orde Baru. Program wajib belajar 6 tahun tersebut, juga mempunyai manfaat agar rakyat Indonesia sejak dini atau dari anak-anak sudah diajarkan dan dibiasakan dalam menuntut ilmu, baik membaca, mengamati, menulis, berhitung, menghafal dan lain sebagainya. Hal itu merupakan salah satu bentuk kepedulian dari Pemerintah Orde Baru terhadap generasi muda Indonesia, supaya sumber daya manusia Negara Republik Indonesia tidak kalah dalam bersaing dengan sumber daya manusia bangsa asing lainnya serta juga dapat membawa Indonesia menjadi negara maju (Muzammil, 2016).

## **C. Berhasil Menerapkan Program Beasiswa bagi Anak Indonesia dengan Daya Intelektual Tinggi namun Ekonomi Rendah**

Program Beasiswa sudah sejak lama ada di Indonesia, jadi sebenarnya program beasiswa tidak hanya terjadi pada masa Pemerintahan Orde Baru saja, akan tetapi sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia, beasiswa sudah ada dan diterapkan di sekolah-sekolah pada umumnya bahkan hingga di tingkat Universitas. Akan tetapi, yang membedakan program beasiswa pada masa penjajahan Belanda dengan program beasiswa masa Pemerintah Orde Baru adalah ketika masa penjajahan Belanda beasiswa hanya berlaku bagi anak-anak Belanda atau pelajar Belanda, orang Bumi Putera atau rakyat Pribumi tidak diperkenankan mendapatkan beasiswa dan pendidikan. Hal itu dapat terjadi karena Belanda tidak ingin mencerdaskan rakyat Pribumi, kecuali pada rakyat Pribumi bangsawan yang kehadirannya memberikan keuntungan terhadap pihak Belanda (Safei & Hudaidah, 2020).

Pada masa Pemerintahan Orde Baru pada tahun 1974 melalui Yayasan Supersemar, Presiden Soeharto memberikan beasiswa kepada anak-anak pelajar Indonesia mulai dari tingkat SD hingga Universitas untuk dapat terus melanjutkan pendidikannya hingga tamat dengan tujuan agar dapat mencetak generasi bangsa yang cerdas dan berbudi luhur. Program beasiswa yang diberikan oleh Presiden Soeharto itu, dinilai cukup sukses dibuktikan dengan banyak siswa dan mahasiswa dengan ekonomi yang rendah atau keterbatasan ekonomi mampu menjadi anak-anak sukses yang mengharumkan nama Indonesia dan membawa martabat Indonesia ke arah yang lebih baik (Muzammill, 2016).

## **Kegagalan Kebijakan Pendidikan Indonesia pada Masa Pemerintahan Orde Baru**

Tidak semua kebijakan yang dikeluarkan atau diterapkan oleh Pemerintah Orde Baru berjalan dengan sukses dan lancar, akan tetapi pada kenyataannya ada juga kegagalan yang dijumpai dari adanya kebijakan Pemerintahan Orde Baru. Salah satunya adalah kegagalan di dalam kebijakan pendidikan. Adapun kegagalan kebijakan pendidikan Indonesia pada masa Orde Baru yaitu:

### **A. Gagalnya Rumusan Tujuan Pendidikan Indonesia**

Tujuan pendidikan Indonesia pada masa Pemerintah Orde Baru menurut TAP MPR No. IV/MPR/1973 yaitu membentuk manusia berpembangunan yang berpancasila, sehat jasmani dan rohani, mempunyai pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kecerdasan intelektual yang tinggi disertai dengan budi pekerti yang luhur, serta mencintai bangsanya dan sesama manusia yang termuat dalam UUD 1945. Hal itu merupakan tujuan pendidikan yang baik dan bagus jika dapat diimplementasikan atau diterapkan, namun pada kenyataannya tujuan pendidikan Indonesia hanya digunakan sebagai alat legitimasi oleh Pemerintah Orde Baru dan sebagai alat loyalitas untuk melanggengkan kekuasaannya. Hal itu dapat terlihat pada masa pemilu, siswa atau mahasiswa yang sudah cukup umur diwajibkan harus memilih partai tertentu seperti Partai Golkar agar menang dalam pemilu. Hal tersebut membuktikan bahwa pendidikan pada masa Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari kepentingan unsur politik di

dalamnya. Pemerintah memanfaatkan peran pendidikan sebagai jalan untuk memenangkan kekuasaan politik (Sarnoto, 2012).

Kemudian hal lainnya dapat terlihat pada peran guru dan dosen, terlihat guru dan dosen ketika mengajar atau melakukan penelitian terutama yang berkaitan dengan Pemerintah Orde Baru tidak boleh membicarakan dan mempublikasikan penelitian yang dapat menjatuhkan Pemerintah Orde Baru, apabila tetap dilakukan maka akan dikenakan sanksi yang berat. Dari hal itu, mulai terlihat bahwa Pemerintah Orde Baru memainkan peran yang sangat tinggi kepada penerapan pendidikan. Walaupun tujuan pendidikan yang dimuat dalam TAP MPR tahun 1973 itu bagus untuk perkembangan pelajar Indonesia, akan tetapi pada hakekatnya hal itu merupakan alat manipulasi Pemerintah Orde Baru terhadap rakyat, agar rakyat percaya kepada segala keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru (Hartono, 2018).

## **B. Gagalnya Pelaksanaan Kurikulum**

Kurikulum menjadi salah satu alat penting dalam pendidikan untuk dapat merumuskan suatu bentuk pembelajaran ke arah yang lebih efektif. Dengan adanya kurikulum, maka guru dan siswa atau dosen dan mahasiswa dapat mengetahui tujuan utama mereka mempelajari ilmu. Akan tetapi pada masa Orde Baru, kurikulum yang dirancang dan dibuat tidak sepenuhnya berhasil, bahkan mayoritas semua gagal karena kurangnya pengkajian lebih dalam terhadap kondisi lapangan dan kesadaran sejarah dari kurikulum sebelumnya. Mayoritas para

pembuat yang merumuskan kurikulum adalah orang-orang politik, sehingga mereka tidak banyak mengikutsertakan guru, dosen atau pengamat sejarah dalam merumuskan kurikulum. Hal tersebut, tentu saja mengakibatkan kurikulum pada masa Orde Baru banyak mengalami pergantian dalam beberapa jenjang tahun (Nasution, 2011).

Kurikulum tahun 1968 adalah kurikulum pada masa awal Orde Baru lahir yang di dalamnya menekankan kemampuan intelektual sebagai prioritas utama. Artinya siswa atau mahasiswa yang pandai adalah yang memperoleh nilai intelektual yang baik seperti mendapat nilai A, B, C atau D, sedangkan keterampilan atau psikomotorik tidak menjadi fokus pembahasan pada kurikulum tahun 1968. Selanjutnya lahir kurikulum pada tahun 1975, yang merupakan perbaikan dari kurikulum tahun 1968 mengingat manusia tidak hanya cerdas di bidang akademik dan teori saja, akan tetapi juga keterampilan. Oleh sebab itu, maka kurikulum tahun 1975 diluncurkan dengan harapan mampu memberikan tingkatan pemikiran pada peserta didik. Kurikulum tersebut juga disebut sebagai kurikulum satuan pelajar yang rencana tujuan pembelajaran dijadikan satu dengan mata pelajaran, alat pembelajaran, dan lain sebagainya (Alhamuddin, 2014).

Kurikulum tahun 1975 dikembangkan dengan pendekatan integratif, artinya semua mata pelajaran yang berdiri sendiri mulai disatukan dan dikelompokkan sesuai ruang lingkungannya, seperti Ilmu Pengetahuan Alam terdiri dari mata pelajaran Kimia, Fisika, dan Biologi. Sementara itu, Ilmu Pengetahuan

Sosial terdiri dari Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi. Mata pelajaran Ilmu Ukur Ruang, Ilmu Ukur Bidang, dan Aljabar menjadi bagian ilmu Matematika. Sementara itu, mata pelajaran Sejarah masih berdiri sendiri, dan dalam ruang lingkup sejarah perjuangan. Mata pelajaran seperti Bahasa Indonesia dan Pendidikan Pancasila juga masih berdiri sendiri. Selain itu, peserta didik juga diajarkan untuk bergerak aktif dalam pembelajaran sehingga secara tidak langsung kurikulum tahun 1975 memberikan keuntungan. Walaupun secara program kurikulum tersebut menguntungkan, akan tetapi pada kenyataannya kurikulum tahun 1975 tidak demikian, siswa semakin diberikan bobot mata pelajaran dan beban belajar yang lebih banyak sehingga mengakibatkan siswa hanya dapat memahami sebagian kecil pelajaran yang diberikan tanpa mampu memahami betul isi pelajaran yang disampaikan (Sarnoto, 2012).

Kemudian kurikulum tahun 1975 berubah menjadi kurikulum 1983 berdasarkan TAP MPR Nomor II/MPR/1983 yang di dalamnya terdapat perubahan pada mata pelajaran Sejarah yang dimasukkan ke dalam pendidikan Pancasila, sehingga pendidikan Pancasila tidak hanya berbicara mengenai Pancasila saja, akan tetapi juga mengajarkan sejarah terutama mengenai sejarah perjuangan. Hal tersebut, tampak jelas maksud peran politik Pemerintah Orde Baru di dalamnya (Abdullah, 2007).

### **C. Gagalnya Penerapan Ujian Negara atau Ujian Nasional**

Salah satu kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru yang mengalami kegagalan adalah gagalnya penerapan Ujian Negara atau Ujian Nasional. Ujian Negara atau yang dikenal sebagai Ujian Nasional adalah ujian yang wajib diikuti oleh para siswa baik tingkat SD, SMP atau SMA untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Ujian Negara dilakukan dengan tujuan agar dapat mengukur kemampuan berfikir siswa terhadap mata pelajaran yang diujikan. Mata pelajaran yang diujikan pun berifat mata pelajaran nasional seperti Matematika, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (Kimia, Fisika, Biologi) untuk taraf SD hingga SMP dan ada tambahan Ilmu Pengetahuan Sosial (Ekonomi, Geografi, Sosiologi) untuk taraf SMA. Tujuan dari Ujian Negara tersebut secara tidak langsung baik dan bagus, akan tetapi pada pelaksanaannya tidak demikian. Hal tersebut karena terdapat beberapa faktor penyebab seperti: Pertama, masing-masing sekolah di berbagai daerah daya mutu pembelajarannya berbeda, sehingga ketika Ujian Negara atau Ujian Nasional dikeluarkan sekolah dengan kualitas pendidikan yang agak rendah terpaksa melakukan manipulasi data atau bocoran jawaban soal dengan harapan siswa mereka banyak yang lulus, hal itu sering terjadi bahkan tetap lestari hingga masa Reformasi (Muzammil, 2016).

Kejadian manipulasi data atau bocoran jawaban soal bisa terjadi karena kurangnya pemerataan sarana pendidikan di semua daerah di Indonesia, hanya pendidikan yang berkelas dan terakreditasi A saja yang mampu menyelesaikan Ujian Negara atau Ujian



Nasional dengan mudah, akan tetapi untuk sekolah yang ada di bawahnya tentu saja tidak. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan pembohongan publik sehingga para lulusan Indonesia tidak dapat bersaing di dunia kerja karena nilai akademik mereka merupakan palsu, nilai A merupakan A palsu, berbeda pada masa pemerintahan Belanda atau pada masa Orde Lama, orang yang mendapatkan nilai A adalah nilai A asli dan ahli dalam bidang itu, sehingga ketika bekerja tidak mengalami kesulitan yang berarti. Oleh karena itu, dengan diadakannya Ujian Negara justru tidak membuat pendidikan Indonesia semakin membaik, akan tetapi malah sebaliknya yaitu semakin memburuk. Pemerintah Orde Baru terkesan tergesa-gesa dalam menyiapkan program pendidikannya untuk generasi masa depan, tanpa melihat baik dan buruknya dari suatu kebijakan yang dibuat (Junaidi, 2020).

#### **D. Gagalnya Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun**

Seperti yang diketahui bahwa program wajib belajar 9 tahun adalah lanjutan dari program wajib belajar 6 tahun. Pada program wajib belajar 6 tahun yang sebelumnya diselenggarakan oleh Pemerintah Orde Baru telah mencapai kesuksesan yang berarti bagi sejarah pendidikan Indonesia. Hal itu dapat terlihat dari banyak anak usia 7-12 tahun sudah bisa membaca dan menulis dari program wajib tersebut. Akan tetapi program wajib belajar selama 6 tahun, pada tanggal 2 Mei 1984 diganti menjadi program wajib belajar 9 tahun yang tujuan utamanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan Indonesia, namun justru

mengakibatkan kegagalan karena program tersebut tidak tepat sasaran dan kurang data riset lapangan mengenai program itu (Notosusanto, 1984).

#### **Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Kebijakan Pendidikan pada Masa Orde Baru**

Pada periode Orde Baru, bidang pendidikan di Indonesia dapat disebut mengalami perkembangan yang begitu pesat apabila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Keberhasilan pada beberapa program pendidikan di periode Orde Baru dapat terjadi karena rezim Orde Baru memiliki semangat pembangunan yang menempatkan pendidikan dalam skala prioritas utama, sehingga meskipun kala itu anggaran bagi sektor pendidikan masih sangat terbatas, akan tetapi pemerintah tetap mampu melaksanakan pembangunan dalam bidang pendidikan dan mendapatkan hasil yang positif (Salim, 2007).

Pemerintah memang berhasil dalam menerapkan sebagian dari kebijakan pendidikannya, namun disamping itu kegagalan yang terjadi di beberapa program pendidikan yang lain dapat disebut sebagai sesuatu yang fatal. Kegagalan-kegagalan dalam program pendidikan di periode Orde Baru dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Orde Baru yang identik dengan pembangunan cenderung menentukan arah pendidikan nasional tidak berpusat pada hakikat pendidikan sebenarnya melainkan pada konteks pembangunan nasional yang sedang marak terjadi pada waktu itu. Di bawah kendali rezim Orde Baru, pendidikan tidak lebih dari sekadar proses untuk membentuk para calon-calon pekerja masa

depan. Manfaat pendidikan bukan ditujukan sebagai modal dalam mempertahankan eksistensi manusia tetapi untuk mengeksploitasi intelektualitas para pelajar demi hasrat kepentingan penguasa (Datumula, 2020).

- 2) Pemerintah Orde Baru dalam mengaplikasikan program pendidikannya cenderung tidak seimbang dan hanya menekankan pada aspek kuantitas saja tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan kualitas. Hal itu lantas menimbulkan berbagai macam ketimpangan seperti yang tergambar jelas pada isi kurikulum-kurikulum pendidikan di sepanjang periode kekuasaannya (Datumula, 2020).
- 3) Pemerintah Orde Baru secara ketat menerapkan pola keseragaman sebagai ideologi dalam melakukan pengujian terhadap kemampuan para pelajar yang sejatinya tidak dapat disamakan antara satu individu dengan individu yang lain. Pola seperti itu dapat menimbulkan terjadinya stratifikasi intelektual di kalangan murid, dan juga tindakan-tindakan kecurangan dalam pelaksanaan ujian baik itu dilakukan oleh murid ataupun oknum sekolah (Datumula, 2020).
- 4) Pemerintah Orde Baru yang sentralistik dalam pengembangan bidang pendidikan nasional memberikan kemudahan pemerintah dalam memonitori dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan kehendaknya. Hal tersebut berpotensi terciptanya pola pendidikan yang manipulatif, kaku, mengancam kebebasan berkembangnya ilmu pengetahuan dan pembatasan terhadap akses pengetahuan

yang sebenarnya melalui jalur pendidikan (Muzammil, 2016).

Berdasar pada penjabaran keempat hal tersebut, tampak bahwa kegagalan yang terjadi pada beberapa program pendidikan Orde Baru sangat didasari oleh peranan dan keputusan rezim pemerintahan yang cenderung hanya menjadikan rakyat sebagai obyek atas realisasi ambisi dalam mempertahankan hegemoni kekuasaan melalui dalih “mencerdaskan anak bangsa”. Orde Baru lebih mengutamakan membangun pendidikan hanya di permukaannya saja, akan tetapi dalam prosesnya itu berjalan beriringan dengan agenda yang sarat dengan ambisi penguasa terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, dampak jangka panjang berupa kualitas manusia yang diharapkan menjadi output dari pelaksanaan pendidikan hanya sekadar menjadi narasi dalam kertas dokumen kebijakan (Muzammil, 2016).

## **KESIMPULAN**

Pada dasarnya suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Orde Baru bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan, akan tetapi tidak semua kebijakan yang diambil dalam proses pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar. Terdapat kebijakan yang dalam proses pelaksanaannya justru mengalami kegagalan. Hal tersebut bukan merupakan salah kebijakan itu sendiri, akan tetapi salah orang yang merumuskan dan membuat kebijakan itu tanpa disertai dengan persiapan yang matang.

Seperti halnya keberhasilan kebijakan pendidikan pada masa Pemerintahan Orde Baru,

setidaknya terdapat 3 kebijakan pada masa kekuasaan Orde Baru yang mengalami keberhasilan yaitu pemberantasan buta huruf, kebijakan tersebut sukses menekan angka buta huruf di Indonesia pada waktu itu yang mempunyai dampak positif berupa banyak masyarakat Indonesia bisa membaca. Kemudian yang kedua mengenai program wajib belajar 6 tahun juga turut menyukseskan program pendidikan masa Orde Baru dan yang terakhir adalah program pemberian Beasiswa sehingga siswa dan mahasiswa Indonesia banyak yang terbantu melalui program Pemerintah Orde Baru tersebut.

Namun disamping keberhasilan kebijakan Pemerintah Orde Baru dalam bidang pendidikan, ternyata juga terdapat kegagalan dari kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru seperti halnya gagal dalam menerapkan tujuan pendidikan sesuai UUD 1945 yang realitanya tujuan pendidikan hanya digunakan sebagai alat loyalitas politik pemerintahan. Kemudian gagal dalam menyusun kurikulum yang baik, sehingga mengakibatkan banyak siswa dan mahasiswa tidak semakin pandai dalam mengikuti kurikulum yang diberikan Pemerintah Orde Baru. Terakhir adalah mengenai program Ujian Negara atau Ujian Nasional, banyak sekolah-sekolah yang menerapkan praktik kecurangan untuk meluluskan siswanya dengan kemampuan akademik yang rendah. Hal itu yang nantinya akan menyebabkan banyak pengangguran dalam dunia kerja di Indonesia.

Keberhasilan dan kegagalan yang dihadapi oleh pemerintah Orde Baru terjadi akibat dari peranan dan keputusan pemerintah kala itu. Semangat pembangunan dan keputusan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama

negara menjadi faktor keberhasilan beberapa program pendidikan di periode Orde Baru. Sedangkan kegagalan di beberapa program pendidikan yang lain disebabkan karena ambisi besar rezim pemerintah dalam mempertahankan kekuasaannya sehingga timbul potensi-potensi keganjilan dalam beberapa program pendidikan yang pada akhirnya berakhir dengan kegagalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abar, A. Z. (1995). *Kisah-kisah Pers Indonesia, 1966-1974*. Yogyakarta: LkiS.
- Abdullah, A. (2007). 'Kurikulum Pendidikan di Indonesia Sepanjang Sejarah (Suatu Tinjauan Kritis Filosofis)' (Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan), 66, (13) pp. 340-361.
- Alhamuddin. (2014). 'Sejarah Kurikulum di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum)' (Jurnal Nur El-Islam), 1, (2) pp. 48-58.
- Datumula, S. (2020). 'Peraturan Kebijakan Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan Kabinet Kerja' (Jurnal Moderasi), 1, (2) pp. 56-78.
- Djumhur, I. & Danasuprata, H. (1979). *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV. Ilmu.
- Garraghan, G.J. (1957). *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press.
- Gottschalk, L. (1983). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Gunawan, A. H. (1986). *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hartono, Y. (2018). 'Pendidikan dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi)' (Jurnal Agastya), 6, (1) pp. 35-45.
- Herlina, N. (2020). *Metode Sejarah Edisi Revisi 2020*. Bandung: Satya Historika.
- Hidayat, R. & Abdillah. (2019). *Ilmu Pendidikan "Konsep, Teori dan Aplikasinya"*. Medan: LPPPI.
- Junaidi. (2020). 'Pendidikan di Era Otonomi Daerah Pasca Orde Baru' (Jurnal Ilmu Pendidikan Islam), 4, (1) pp. 431-444.
- Mestoko, S, dkk. (1985). *Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Muzammil, A. (2016). 'Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan dari Orde Lama Sampai Orde Baru (Suatu Tinjauan Historis)' (Jurnal Kependidikan Islam), 2, (2) pp. 183-198.
- Nasution. (2011). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bandung: PT. Bumi Aksara.
- Notosusanto, N. (1984). *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah*. Jakarta: Mega Book Store.
- Notosusanto, N. (1984). *Kurikulum 1984: Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP), Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA)*. Jakarta: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.
- Safei & Hudaidah. (2020). 'Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998)' (Jurnal Humanitas), 7, (1) pp. 1-13.
- Salim, A, dkk. (2007). *Indonesia Belajarlah! Membangun Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sarnoto, A. Z. (2012). 'Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia' (Jurnal Educhild), 1, (1) pp. 30-40.
- Suryomihardjo, A. (1975) *Pemahaman Bangsa dan Masalah Historiografi*. Jakarta: Idayu.
- Syahrudin & Susanto, H. (2019). *Sejarah Pendidikan Indonesia (Era Pra Kolonialisme Nusantara Sampai Reformasi)*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.